

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DITINJAU DARI BUDAYA SEKOLAH DAN SARANA PRASARANA DI SMP NEGERI 45 PALEMBANG

Dorawati Br Ginting¹⁾
Bukman Lian²⁾
Meilia Rosani³⁾

1) SMP Negeri 45 Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

2) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Palembang

3) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Palembang

E-mail: dorawatibrginting@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the factors that support and hinder the implementation of the School Empowerment Program, as observed from the perspectives of school culture and infrastructure. The study adopts a qualitative descriptive research design conducted at SMP Negeri 45 Palembang, with key informants including the school principal, vice principal, supervisors, teachers, parents, and students. Data collected were analyzed interactively and continuously using Miles and Huberman's model, involving data reduction (summarizing and selecting key points), presenting data in concise patterns, and verifying or drawing conclusions. The findings conclude that the implementation of the School Empowerment Program at SMP Negeri 45 Palembang is significantly influenced by school culture factors. Elements such as a clear program structure, freedom in teaching methods, initiatives from teacher facilitators, and effective communication create a supportive environment. However, there are hindering factors, including uneven responsibilities, lack of teacher experience, and ineffective coordination. In addition to school culture, infrastructure also plays a pivotal role in successful implementation. Measures such as needs analysis, participatory planning, and meticulous inventory support program implementation. Nevertheless, challenges such as budget constraints, inventory inaccuracies, and distribution obstacles pose serious obstacles.

Keywords: *School Empowerment; School Culture; Infrastructure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program sekolah penggerak ditinjau dari budaya sekolah dan sarana prasarana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di SMP Negeri 45 Palembang dengan informan kepala sekolah, wakasek, pengawas, guru, wali murid, dan siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (merangkul dan memilih hal-hal pokok), penyajian data dalam pola singkat, dan diverifikasi atau disimpulkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program sekolah penggerak di SMP Negeri 45 Palembang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sekolah. Faktor-faktor seperti struktur program yang jelas, kebebasan dalam metode pembelajaran, inisiatif guru penggerak, dan komunikasi yang efektif menciptakan lingkungan yang mendukung. Namun, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat, seperti tanggung jawab yang tidak merata, kurangnya pengalaman guru, dan kurangnya koordinasi efektif. Selain budaya sekolah, sarana prasarana juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi. Langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, perencanaan partisipatif, dan inventarisasi yang cermat mendukung implementasi program. Namun, masalah seperti minimnya anggaran, kesalahan dalam inventarisasi, dan kendala dalam pendistribusian dapat menjadi hambatan serius.

Kata Kunci: Sekolah Penggerak; Budaya Sekolah; Sarana Prasarana

PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, merancang lima strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia agar unggul. Program ini disebut sebagai Merdeka Belajar. Hasil dari *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa anak Indonesia memiliki kompetensi yang rendah. Oleh karena itu, program ini direncanakan untuk menjawab tantangan rendahnya kompetensi anak Indonesia dan menyiapkan mereka untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan bergaul dalam masyarakat 5.0. Lima strategi ini termasuk metode pemilihan kepala sekolah yang lebih selektif, menciptakan generasi pendidik baru, menyederhanakan rencana pendidikan, evaluasi kompetensi minimum sebagai pengganti Ujian Nasional, serta

optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berhubungan dengan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung-jawab. Seiring untuk mewujudkannya, Menteri Nadiem Makarim mengganti Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka.

Sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka pada tahun 2021 tergabung dalam program sekolah penggerak. Pelaksanaan program ini diatur dalam Keputusan Menteri dengan SK Menteri No. 162 Tahun 2021. Program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu adalah program Kemendikbud dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Nadiem Makarim, melalui akun *youtube* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan penyesuaian pendekatan perubahan pendidikan di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan di sekolah. Menurutnya, perubahan dapat dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang bisa menjadi model dalam kegiatan pembelajaran “Saya perlu menyampaikan ide satu konsep sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang dapat menggerakkan berbagai sekolah (Mendikbudristek, 2021).

Penulis mengamati terjadinya penurunan capaian belajar peserta didik di lingkungan SMP Negeri 45 Palembang. Peserta didik menunjukkan kurangnya semangat dalam mengikuti pembelajaran, tingkat kehadiran yang menurun, dan tingkah laku yang kurang etika selama pembelajaran. Awalnya, penulis mencoba menganalisis penyebab hal tersebut dan beranggapan bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh kebosanan akibat penggunaan modul daring atau kurangnya penyampaian materi dengan baik. Namun, hal tersebut menjadi lebih serius ketika beberapa guru yang diajak berdiskusi mengungkapkan hal yang sama.

Program Sekolah Penggerak memiliki tujuan yang luas untuk mendorong perubahan positif dalam pendidikan, mulai dari peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan literasi, hingga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah. Perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki hasil pembelajaran peserta didik secara menyeluruh (holistik) dan memiliki Profil Pelajar Pancasila. Adapun manfaat dari program ini, diantaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan yang ada di daerah, peningkatan kualitas SDM di daerah, adanya efek multiplier dari sekolah penggerak yang

dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, dan juga menjadikan daerah sebagai rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan UPT untuk mensinergikan visi dan misi program ini agar dapat terlaksana dengan baik.

Sekolah Penggerak adalah usaha berkelanjutan untuk meningkatkan hasil asesmen PISA dan mengurangi kerugian pembelajaran akibat bencana Covid-19. Pendekatan ini berfokus pada pengajaran dan pembelajaran yang berkesinambungan, menyediakan pendidik dengan bimbingan yang tepat, mengembangkan pembelajaran online yang komprehensif, serta meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga berfokus pada peningkatan kompetensi guru, peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Budaya sekolah yang kondusif merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah penggerak. Sekolah yang menciptakan budaya yang kondusif akan membuat para siswa merasa nyaman dan menghargai lingkungan sekolah. Budaya yang kondusif ini juga akan membantu para guru dan staf untuk fokus dalam memimpin dan menggerakkan sekolah. Dengan demikian, budaya sekolah yang kondusif akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi sekolah penggerak.

Sarana dan prasarana yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sekolah penggerak adalah fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang cukup luas,

peralatan modern, serta akses internet yang cepat dan handal. Fasilitas ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memungkinkan para siswa untuk menemukan informasi yang relevan dengan materi ajar yang diajarkan. Akses ke media elektronik seperti komputer juga penting untuk memungkinkan para siswa untuk mencari informasi tambahan dan berkomunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah.

Keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak dengan penekanan pada budaya sekolah dan sarana prasarana. Pendekatan ini memberikan pandangan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara Program Sekolah Penggerak, budaya sekolah, dan fasilitas fisik. Dengan merinci dan menganalisis kompleksitas interaksi antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang implementasi Program Sekolah Penggerak, serta memberikan landasan bagi transformasi pendidikan yang lebih baik.

Menyikapi dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang implementasi Program Sekolah Penggerak dengan fokus pada budaya sekolah dan sarana prasarana di SMP Negeri 45 Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan selama empat bulan dari bulan Juli hingga Oktober tahun 2023 di SMP Negeri 45 Palembang, berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Sungai Sahang, Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang. Obyek penelitian diantaranya kepala sekolah,

wakasek bidang kurikulum, wakasek bidang sapa, pengawas sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model penelitian berupa deskriptif kualitatif. Variabel dalam penelitian adalah implementasi program sekolah penggerak ditinjau dari budaya sekolah dan sarana prasarana sekolah. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan prosedur Miles and Huberman melalui prosedur: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Penggerak Ditinjau dari Budaya Sekolah dan Sarana Prasarana

Peran budaya sekolah dan sarana prasarana dalam implementasi Program Sekolah Penggerak. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kedua aspek ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini, serta memberikan pandangan konstruktif terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah.

Faktor-faktor budaya sekolah yang mendukung implementasi program sekolah penggerak

Faktor-faktor budaya sekolah yang mendukung implementasi program sekolah penggerak diantaranya: program sekolah penggerak secara struktural menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu wakasek, dan guru-guru penggerak. Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggung jawab secara struktural terhadap implementasi program sekolah penggerak. Wakasek dalam program ini memberikan bantuan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan program sekolah

penggerak. Keterlibatan wakil kepala sekolah menunjukkan adanya kerjasama dan pembagian tugas dalam mengelola program tersebut. Menurut studi (Ramadina, 2021) bahwa tanggung jawab kepada sekolah adalah menjalankan peran sebagai supervisor sekaligus pemimpin perubahan dalam lembaga pendidikan, serta memiliki peran strategis dalam proses pengembangan kurikulum. Sedangkan studi (Julaiha, 2019) mengungkapkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya, disamping itu bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya yang ada agar mampu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor pendukung lainnya adalah kebebasan dan independensi implementasi program sekolah penggerak cukup dirasakan guru penggerak dan peserta didik. Menurut studi (Syafi'i, 2021) bahwa merdeka belajar program sekolah penggerak merupakan proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik. Transformasi yang diharapkan tidak hanya sebatas pada satuan pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong, sehingga perubahan dapat menjadi secara luas dan terlembaga untuk menciptakan profil pelajar Pacasila.

Warga sekolah khususnya guru penggerak telah berinisiatif melakukan beberapa hal dalam pengimplementasian program sekolah penggerak, diantaranya lokakarya bersama, inovasi media dan metode pembelajaran, belajar *outdoor*, belajar bersama wali murid, dan sebagainya.

Hal ini didukung oleh studi (Eni, 2023), seorang guru harus mampu menggerakkan seluruh elemen di lembaga sekolah dalam inovasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, maupun masyarakat setempat.

Implementasi program sekolah penggerak di SMP Negeri 45 Palembang melibatkan berbagai tindakan progresif, inovatif dan keberanian untuk menghadapi resiko sehingga program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini selaras dengan pendapat (Daryanto & Tarno, 2015) bahwa setiap perubahan budaya sekolah menyebabkan adanya resiko yang harus diterima khususnya bagi pembaharu. Ketakutan akan resiko menyebabkan kurang beraninya seorang pemimpin mengambil sikap dan keputusan dalam waktu cepat.

Faktor pendukung berikutnya adalah sekolah mengadakan perubahan visi terkait pemberlakuan kurikulum merdeka belajar (program sekolah penggerak). Visi tersebut didukung dengan ditetapkannya misi, serta upaya-upaya yang terkoordinasi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut penelitian (Djafri dkk., 2021) bahwa kepala-kepala sekolah di masa datang harus lebih memiliki jiwa revolusioner yang mampu menerima dan mengimplementasikan perubahan melalui visi, misi, dan tujuan untuk mengembangkan sekolah.

Kepala sekolah selaku pimpinan telah melakukan koordinasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil kinerja seluruh unit kerja. Hal ini sebagaimana studi (Hidayat dkk., 2023) bahwa kepala sekolah sebagai penggerak proses pembelajaran yang terpusat pada siswa dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi guru untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan siswa,

dan memberikan ruang bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan potensi diri dalam kualitas bekerja sehingga tujuan pendidikan secara mutlak dapat terpenuhi.

Pengaturan program sekolah penggerak didasarkan atas Keputusan Mendikbudristek No. 162 tahun 2021, yang pelaksanaannya di sekolah dilakukan kepala satuan pendidikan, dan diawasi oleh penilik (pengawas sekolah). Pengaturan program tersebut tentunya tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut studi (Faiz dkk., 2022) bahwa diterapkan Kemendikbud-Ristek pada tahun ajaran 2022/2023 memiliki tujuan yang sangat baik yaitu menginginkan pembelajaran lebih aktif dan adaptif dengan memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada proyek pembelajaran.

Guru penggerak sejauh ini telah mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki sebagai kesiapannya terlibat dalam implementasi program sekolah penggerak. Hal ini selaras dengan penelitian (Marliyani & Iskandar, 2022) bahwa kepala sekolah sebagai penggerak proses pembelajaran yang terpusat pada siswa dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi guru untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan siswa, dan memberikan ruang bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan potensi diri dalam kualitas bekerja sehingga tujuan pendidikan secara mutlak dapat terpenuhi.

Guru penggerak mendapatkan intensif untuk pembelian paket data, dan imbalan lainnya berupa kenaikan pangkat/ golongan, prioritas menjadi kepala sekolah atau penilik, yang tentunya juga akan meningkatkan pendapatan berupa gaji yang akan

diterimanya tiap bulan. Hal ini selaras dengan pendapat (Daryanto & Tarno, 2015) bahwa pengembangan budaya sekolah hendaknya disertai dengan sistem imbalan meskipun tidak selalu dalam bentuk barang atau uang dan bentuk penghargaan atau kredit poin.

Komunikasi antar personil sekolah dibatasi oleh hierarki yang formal. Hal ini sebagaimana dengan pendapat (Daryanto & Tarno, 2015) bahwa komunikasi formal merupakan dasar bagi koordinasi dalam sekolah, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan pentingnya budaya sekolah kaitannya dengan program sekolah penggerak.

Faktor-faktor budaya sekolah yang menghambat implementasi program sekolah penggerak

Faktor penghambat budaya sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak. Tingkat tanggung jawab implementasi program sekolah penggerak adakalahnya menjadi beban kepala sekolah dikarenakan tidak semua orang-orang yang dilibatkan berkompeten, dan belum mengikuti pelatihan sehingga hasil yang dicapai cenderung terlambat dan tidak sempurna. Menurut penelitian (Dewi & Astuti, 2022) bahwa belum semua guru mendapatkan pelatihan, banyak guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, serta banyak guru yang belum bisa melakukan penilaian autentik. Selain itu juga, guru belum memahami substansi kurikulum sehingga tidak bisa menerapkannya dengan baik. Kelemahan utama guru dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman pendekatan tematik saintifik tanpa tes kognitif dan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Demikian juga dukungan sekolah masih rendah karena belum banyak warga sekolah

yang mendapatkan pelatihan kurikulum merdeka. Penyebab utama rendahnya dukungan sekolah karena kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kurikulum baru ini, terutama kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kurang matangnya perencanaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka menjadi faktor penghambat.

Kebebasan dan independensi dalam implementasi program sekolah penggerak dapat menghambat capaian pembelajaran yang dikarenakan kurang berpengalaman-nya dan ketidakikutsertaan pelatihan guru penggerak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari dkk., 2023) bahwa hambatan dalam implementasi program sekolah penggerak diantaranya: (1) guru tidak didukung dengan pelatihan kurikulum merdeka, (2) terbatasnya guru mendapatkan referensi untuk melaksanakan merdeka belajar; (3) terkadang guru kesulitan mengakses digital, media atau internet; dan (4) kurangnya pengalaman dalam melaksanakan kemerdekaan belajar.

Minimnya guru penggerak berinisiatif melakukan beberapa hal yang memudahkan implementasi program sekolah penggerak dikarenakan faktor umur dan ketidakikutsertaan pelatihan. Sementara studi (Lubis dkk., 2023) mengungkapkan bahwa terbatasnya waktu menjadikan peran guru penggerak terbatas dan tidak leluasa melaksanakan perannya sebagai guru penggerak.

Koordinasi yang kurang maksimal dan terkesan memaksa menyebabkan pekerjaan yang dilakukan tergesa-gesa dan hasilnya kurang sempurna. Sedangkan pengaturan dan pengawasan implementasi program sekolah penggerak diantaranya penekanan penggunaan metode terkini pada guru yang kurang berpengalaman, belum adanya keterlibatan wali murid dan

masyarakat dalam menyusun program, ketergantungan pada platform digital pemerintah, serta masa kerja guru yang mendekati pensiun. Demikian juga penelitian (Almarisi, 2023) bahwa kurangnya persiapan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kendala bagi satuan pendidikan, terlebih belum memadainya sumber daya manusia, dan belum baiknya sistem pendidikan dan pengajaran.

Faktor penghambat lainnya adalah adanya konflik yang terjadi karena ketidaksepahaman personil sekolah, kurangnya fasilitas pendukung dalam program tersebut, dan tidak sebandingnya intensif yang diterima. Sedangkan kritik yang diberikan adalah peran serta Dinas Pendidikan untuk memantau dan terjun secara langsung ke sekolah-sekolah kebenaran akan laporan tertulis, sehingga terpenuhinya unsur kredibilitas dan akuntabilitas dari laporan tersebut. Selanjutnya komunikasi personil sekolah dipengaruhi faktor prosedur hierarki yang formal dengan memenuhi administrasi sekolah dalam program sekolah merdeka sehingga keleluasaan dan kebebasan berkomunikasi dapat terhambat. Menurut penelitian (Bailah, 2021) terdapat tiga indikator pada faktor komunikasi yang penghambat implementasi program. Indikator transmisi, informasi yang tersampaikan tidak utuh dan tidak lengkap. Berikutnya indikator kejelasan, informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan jelas pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan indikator konsistensi, informasi yang diterima tidak konsisten sangat besar pengaruhnya menghambat implementasi program di lapangan.

Faktor-faktor sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program sekolah penggerak

Sekolah telah melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan sarana prasarana melalui mekanisme usulan warga sekolah, penyusunan kebutuhan dan rencana pengadaan, perpaduan rencana kebutuhan dengan sarana dan prasarana yang ada, mengintegrasikan rencana dengan kemampuan *financial*, membuat skala prioritas, dan kemudian menetapkan rencana. Hal ini dipertegas oleh penelitian (Samanhudi, 2021) guna mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan, meliputi perencanaan, tujuan dan manfaat, perinsip perencanaan, prosedur, klasifikasi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pengadaan sarana dan prasarana pada sekolah telah menjalankan program sekolah penggerak harus tepat sasaran dan berdaya guna (efisien), sesuai dengan kebutuhan, bersifat terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan untuk bersaing, tersedianya informasi pengadaan barang/ jasa terbuka bagi penyedia barang, adanya perlakuan yang sama bagi penyedia barang/ jasa, dan mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas. Temuan ini sejalan dengan studi (Novita, 2017) bahwa pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai suasana proses belajar-mengajar yang kondusif dan nyaman sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Sekolah telah melakukan pencatatan sarana dan prasarana sekolah, yang kemudian diberikan kode terkait nama dan jumlah barang/ jasa, dan bentuk fisik atau kelayakannya. Setelah tercatat dalam buku inventerisasi, selanjutnya dilaporkan kepada kepala sekolah. Faktor pendukung sebagaimana studi (Boko,

2020) bahwa inventarisasi dilakukan dengan tujuan: untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah; menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah; sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materiil yang dapat dinilai dengan uang; dan memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana yang dimiliki sekolah.

Pendistribusian dan pemanfaatan barang/jasa juga dinilai tepat dalam penyampaian, serta tepat sasaran sesuai dengan kondisi barang yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sofian dkk., 2022), bahwa pengadaan sarana dan prasarana telah melalui tahapan proses pendistribusian berdasarkan alokasi pendistribusian yaitu adanya ketetapan barang, penerimaan barang, jumlah barang serta jenis barang yang akan disalurkan dan waktu penyaluran barang.

Pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang mendukung implementasi program sekolah penggerak dilakukan secara terus menerus, berkala, darurat dan preventif. Hal ini didukung oleh penelitian (Fathurrahman & Dewi, 2019) bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dengan cara melakukan pembersihan, perawatan, pengawasan secara berkala sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Sedangkan untuk penghapusan dilakukan apabila barang tersebut rusak.

Faktor-faktor sarana dan prasarana yang menghambat implementasi program sekolah penggerak

Sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi tentunya menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu program.

Hal ini sebagaimana diungkapkan (Rosida & Nurzaima, 2020) bahwa perencanaan pengadaan sarana dan prasarana karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar sekolah.

Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah adalah minimnya anggaran yang dimiliki sekolah, barang/ jasa bantuan pemerintah/ dinas pendidikan memiliki kualitas rendah. Dilihat dari inventerisasi, ditemukan ketidakakuratan jumlah barang yang tercatat, dan terdapat pengkodean nama-nama barang yang keliru. Faktor-faktor sarana dan prasarana yang menghambat juga diungkapkan (Khikmah, 2020) komitmen masing-masing sumber daya manusia, minimnya dana, regulasi yang rumit dan kurangnya pengembangan keterampilan pegawai. Sementara studi (Trisnawati dkk., 2019) menyimpulkan bahwa faktor penghambat pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya keterbatasan dana dalam mendukung kegiatan sarana dan prasarana hanya mengandalkan dari segi dana Bos, pengawas serta supervisi kurang aktif dikarenakan lokasi sekolah jauh sehingga kurang motivasi dari pengawas berkunjung ke sekolah, dan kurangnya birokrasi bantuan pemerintah sedikit lambat dalam penanganan hal sarana dan prasarana.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Program Sekolah Penggerak di SMP Negeri 45 Palembang terbukti didukung oleh sejumlah faktor budaya sekolah yang signifikan. Struktur program yang jelas dengan pembagian tanggung jawab yang terdefinisi antara kepala sekolah, Wakasek, dan guru-guru penggerak berhasil menciptakan koordinasi yang efisien. Kebebasan dan independensi dalam pemilihan metode dan materi pembelajaran telah meningkatkan minat

belajar peserta didik, sedangkan inisiatif aktif dari warga sekolah, khususnya guru penggerak, dalam mengadakan lokakarya, menciptakan inovasi, dan berkolaborasi dengan wali murid juga memberikan kontribusi positif. Implementasi program yang progresif dan inovatif, serta keberanian untuk menghadapi risiko, telah membawa keberhasilan program ini. Perubahan visi dan misi sekolah terkait dengan kurikulum merdeka belajar dan upaya terkoordinasi dalam mencapai tujuan memberikan fondasi yang kokoh.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak juga teridentifikasi melalui faktor-faktor budaya sekolah yang menghambat. Tanggung jawab yang tidak merata dapat membebani kepala sekolah, menyebabkan keterlambatan, dan menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Kurangnya pengalaman dan pelatihan bagi guru penggerak dapat menghambat kebebasan dalam implementasi program, sementara minimnya inisiatif dari guru penggerak yang tidak mendapatkan pelatihan dapat menghambat kelancaran program. Koordinasi yang kurang efektif dapat mengakibatkan pekerjaan yang terburu-buru dan tidak sempurna, sedangkan pengaturan dan pengawasan program yang kaku, kurangnya partisipasi wali murid, dan ketidakpartisipasian masyarakat juga menjadi hambatan. Biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh guru untuk mengikuti lokakarya juga menjadi kendala.

Dalam hal sarana prasarana, implementasi program di SMP Negeri 45 Palembang mendapatkan dukungan melalui analisis kebutuhan dan perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif warga sekolah. Meskipun demikian, tantangan muncul seperti minimnya anggaran sekolah, kesalahan pengkodean barang, kendala

dalam pendistribusian, dan pemeliharaan yang terhambat oleh alokasi anggaran yang terbatas. Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung Program Sekolah Penggerak di SMP Negeri 45 Palembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam atas bimbingan Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR dan Ibu Dr. Hj. Meilia Rosani,S.H.,M.H., yang luar biasa serta dukungan keluarga dan teman sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarisi, A. (2023). Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 111–117. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6291>
- Bailah, B. (2021). *Tantangan Kepala Sekolah Penggerak Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Paradigma Baru*. 2(2), 92–114.
- Boko, Y. A. (2020). Perencanaan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Sekolah. *JUPEK: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 1(1), 44–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4435225>
- Daryanto, D., & Tarno, H. (2015). *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*. Gava Media.
- Dewi, L. M. A. W., & Astuti, N. P. E. (2022). Hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas IV SDN 3 Apuan. *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka*, 4(2), 31–39.
- Djafri, N., Arwildayanto, A., & Suling, A. (2021). Manajemen Kepemimpinan Inovatif pada Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Merdeka Belajar Era New Normal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1441–1453. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.901>
- Eni, E. (2023). Guru Penggerak Sebagai Harapan Baru Lahirnya Calon Kepala Sekolah Inovatif. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6), 469–474. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.586>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>
- Fathurrahman, F., & Dewi, R. O. P. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Mendukung Proses Belajar Siswa di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan*. 8(1), 178–187. <https://doi.org/10.30736/rfma.v8i1.141>
- Hidayat, E., Pardosi, A., & Zulkarnaen, I. (2023). Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 6(1), 9–18.

- <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.1.2023.2339>
- Julaiha, S. (2019). Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, 6(3), 51–62.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123–130. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i22020p123>
- Lubis, R. R., Amelia, F., Alvionita, E., Nasution, I. E., & Lubis, Y. H. (2023). Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Pemerataan Kualitas Kinerja Guru. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 33(1), 70–82. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v33i1.170>
- Marliyani, T., & Iskandar, S. (2022). Program Sekolah Penggerak (PSP) terhadap Kinerja dan Manajemen Kepala Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6679–6685. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3255>
- Mendikbudristek. (2021). *Kepmendikbudristek No.162 tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak* (Patent 162). <https://ksptendik.kemdikbud.go.id/read-news/kepmendikbud-nomor-162m2021-tentang-program-sekolah-penggerak>
- Novita, M. (2017). Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam. *Nur El-Islam*, 4(2), 97–129.
- Ramadina, E. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Mozaic Islam Nusantara*, 7(2), 131–142. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.252>
- Rosida, W., & Nurzaima, N. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pada PAUD Nurul Magfirah Kota Kendari. *Edum Journal*, 3(1), 72–78. <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i1.51>
- Samanhudi, S. (2021). Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islami di Lembaga Pendidikan. *Rayah Al-Islam*, 5(2), 268–294.
- Sari, A. D. P., Ahadin, A., & Fauzi, F. (2023). Kendala Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Elementary Education Research*, 8(2), 60–68.
- Sofian, S., Neliwati, N., & Marpaung, S. F. (2022). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Administrasi Akademik di Madrasah Aliyah Laboratorium UNSU Medan. *JURNAL FADILLAH – Manajemen Pendidikan Islam & Umum*, 2(2), 1–20.
- Syafi'i, F. F. (2021). Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 39–49.

Trisnawati, T., Harun, C. Z., & Usman, N. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri Lamteubee Aceh Besar. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 7(1), 62–69.